



Gabriella Yuan Anna Sebut Uang Mengalir ke Sejumlah Pihak

YOGYA, TRIBUN - Lima orang saksi kembali diperiksa dalam sidang kasus dugaan suap rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Soepomo Cs yang melibatkan mantan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra dan mantan jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono. Dari keterangan para saksi, ditemukan beberapa fakta baru terkait kasus duga-

an suap ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (22/1) menghadirkan lima orang saksi. Lima saksi tersebut merupakan pejabat di PT Manira Arta Mandiri. Kelimanya adalah Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku direktur utama perusahaan tersebut, Novi

Hartono, Prianto, Nur Alam Akbar, dan Candra Sugianto.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Asep Permana, kelima saksi duduk bersama-sama di depan meja majelis hakim. Dalam kesaksiannya, Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Anna Kusuma

● ke halaman 15

Gabriella Yuan Anna Sebut

● Sambungan Hal 9

mengatakan selain membawa bendera PT Widoro Kandang, ia juga membawa bendera PT Paku Bumi Manunggal.

Dari hasil lelang, PT Widoro Kandang menempati urutan pertama, sementara PT Paku Bumi Manunggal menempati urutan ketiga. Pada saat itu, Gabriella sempat meminta Eka Safitra yang juga mantan anggota TP4D untuk memenangkan PT Pakubumi, agar keuntungannya lebih besar. Namun ternyata tidak bisa.

Bahkan, dia juga sempat meminta dan akan memberi fee separuh dari selisih antara pemenang dua

dan tiga. Namun, saat itu yang nomor dua adalah sebuah perusahaan dari Surabaya.

Gabriella juga memberikan kesaksian, bahwa selain memberikan uang kepada Eka Safitra, ia juga memberikan uang kepada pihak lain. Saat ditanya JPU terkait aliran uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Gabriella mengaku tidak memberikan. Namun, dia mengakui ada permintaan setengah persen dari hasil lelang.

"Kalau dimintai uang terimakasih untuk operasional dinas tidak ada. Cuma kemarin Kadis (setelah tanda tangan kontrak) ada permintaan setengah persen. Nanti akan dialokasikan melalui pekerjaan

tambahan. Tapi belum terrealisasi karena sudah keburu OTT," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengungkapkan nama pihak lain seperti Wali Kota Yogyakarta juga pernah disebut dalam BAP. Bahkan, Wali Kota sempat diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, saat ini pihaknya fokus pada penuntasan kasus rehabilitasi SAH Soepomo cs.

"Sudah sempat disebutkan juga. Nanti bisa kita dalam. Tetapi kita fokus dulu dengan penyelesaian kasus SAH Supomo. Paling tidak ini menjadi pintu masuk bagi kami untuk menggali kasus lain di Yogyakarta, karena memang baru pertama kalinya KPK menyentuh Yogyakarta," ujarnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Negatif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005